

PENGARUH TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara
M. Rizky Indrawan Saputra¹, Adrian Kurnia Sobana Putra², Syahriful Ahyar³, Bagus
Saputra⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: rizky.indrawan.sya@gmail.com¹, kurniaadrian01@gmail.com²,
syahrifulahyar21@gmail.com³, bagashsksh@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi anggaran di Kota Tanjungpinang telah meningkat melalui penerapan sistem digital dan keterbukaan informasi publik, meskipun masih terdapat tantangan terkait literasi keuangan masyarakat dan pemanfaatan informasi anggaran. Selain itu, terdapat hubungan signifikan antara transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara. Semakin transparan informasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat termasuk harapan dan keinginan masyarakat, kesadaran diri, serta dukungan pemerintah, sedangkan hambatan utama berasal dari faktor pekerjaan dan ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah terus meningkatkan transparansi anggaran dan mengatasi hambatan dalam partisipasi masyarakat guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

Kata Kunci: Transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, pengawasan keuangan negara

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Causa



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

This study aims to analyze the relationship between budget transparency and public participation in state financial supervision in Tanjungpinang City. The research method used is quantitative descriptive, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that the level of budget transparency in Tanjungpinang City has increased through the implementation of digital systems and openness of public information, although there are still challenges related to public financial literacy and the use of budget information. In addition, there is a significant relationship between budget transparency and public participation in state financial supervision. The more transparent the budget information provided by the government, the greater the public participation in supervision. Factors that influence public participation include public expectations and desires, self-awareness, and government support, while the main obstacles come from employment and economic factors, as well as low levels of public education. This study provides recommendations for the government to continue to improve budget transparency and overcome obstacles to public participation in order to achieve better and more accountable governance.

Keywords: Budget transparency, public participation, state financial supervision

PENDAHULUAN

Transparansi sebagai Pilar Utama Pemerintahan yang Baik, transparansi dalam pemerintahan adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika informasi mengenai pengelolaan keuangan negara disampaikan secara terbuka, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah, mengidentifikasi potensi penyimpangan, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, transparansi memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui alokasi anggaran, proyek-proyek yang sedang berjalan, serta hasil yang dicapai. Hal ini akan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan negara.

Meskipun pentingnya transparansi sudah disadari, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara bukanlah hal yang mudah. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain: a). Kurangnya pengetahuan: Masyarakat seringkali kurang memahami mekanisme pengelolaan keuangan negara, sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan pengawasan yang efektif. b). Akses informasi yang terbatas: Tidak semua informasi mengenai anggaran negara mudah diakses oleh masyarakat. Terkadang, informasi yang tersedia disajikan dalam format yang kompleks dan sulit dipahami. c). Kurangnya kepercayaan: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menghambat partisipasi mereka dalam pengawasan. d). Kurangnya kapasitas: Masyarakat seringkali tidak memiliki kapasitas yang cukup, baik dari segi waktu maupun sumber daya, untuk melakukan pengawasan secara intensif. e). Kurangnya dukungan dari pemerintah: Pemerintah belum sepenuhnya memberikan dukungan yang diperlukan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat (Hikmah, 2020).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain: a). Meningkatkan kepercayaan: Transparansi membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. b). Mencegah korupsi: Dengan adanya transparansi, tindakan korupsi lebih mudah terdeteksi dan diungkap. c). Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Masyarakat dapat memberikan masukan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan. d). Memperkuat demokrasi: Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara memperkuat sistem demokrasi.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara, diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun media. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: a). Meningkatkan akses informasi: Pemerintah perlu menyediakan informasi anggaran secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. b). Melakukan sosialisasi: Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan negara. c). Membentuk forum partisipasi: Membentuk forum-forum partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait anggaran. d). Memberdayakan masyarakat sipil: Organisasi masyarakat sipil dapat berperan penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. e). Mendorong peran media: Media massa memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara dan mendorong partisipasi masyarakat (Wijanarko, 2023).

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara dapat terus ditingkatkan, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat transparansi anggaran di kota Tanjung Pinang?
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat transparansi anggaran dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara?

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi Anggaran, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Keduanya

Konsep Transparansi Anggaran

Transparansi anggaran adalah konsep di mana informasi mengenai anggaran suatu entitas, baik pemerintah pusat maupun daerah, disajikan secara terbuka, mudah diakses, dan dipahami oleh publik. Informasi tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Tujuan utama dari transparansi anggaran adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran.

Indikator Transparansi Anggaran:

- Ketersediaan Informasi: Apakah informasi anggaran disajikan secara lengkap dan komprehensif?
- Aksesibilitas: Apakah informasi mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai saluran, seperti website resmi, media sosial, atau kantor pelayanan publik?
- Kejelasan Informasi: Apakah informasi disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum?
- Ketepatan Waktu: Apakah informasi disampaikan secara tepat waktu, sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaan anggaran secara berkala?
- Partisipasi Publik: Apakah masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran? (Werimon, 2013)

Pentingnya Transparansi Anggaran:

- Meningkatkan Akuntabilitas: Transparansi mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya penyimpangan.
- Meningkatkan Kepercayaan Publik: Masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah jika informasi mengenai penggunaan anggaran disampaikan secara terbuka.
- Mencegah Korupsi: Transparansi dapat mencegah terjadinya korupsi karena tindakan koruptif lebih sulit dilakukan jika semua informasi terpapar ke publik.
- Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Transparansi dapat mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan efektif.
- Memperkuat Demokrasi: Transparansi memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat sistem demokrasi.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk dalam pengawasan penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, hingga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anggaran (Werimon, 2013).

Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat:

- Partisipasi Konsultatif: Masyarakat memberikan masukan atau saran terhadap rancangan anggaran.
- Partisipasi Kolaboratif: Masyarakat ikut serta dalam merumuskan kebijakan dan program anggaran.
- Partisipasi Kontrol: Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan melaporkan jika ditemukan penyimpangan.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat:

- Tingkat Pendidikan: Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif berpartisipasi.
- Kesadaran Politik: Kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi akan mendorong masyarakat untuk terlibat.
- Kepercayaan terhadap Pemerintah: Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan mempengaruhi minat mereka untuk berpartisipasi.
- Ketersediaan Informasi: Ketersediaan informasi yang lengkap dan mudah diakses akan memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi.
- Dukungan Infrastruktur: Adanya infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas publik dan teknologi informasi, akan mempermudah partisipasi masyarakat.

Hubungan Transparansi dan Partisipasi

Teori yang Mendasari:

- Teori Agensi: Transparansi dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
- Teori Demokrasi Partisipatif: Transparansi adalah salah satu syarat penting untuk mewujudkan demokrasi partisipatif, di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan publik.
- Teori Sosial Modal: Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan sosial dan modal sosial, sehingga mendorong partisipasi masyarakat.

Hubungan Positif:

- Transparansi Meningkatkan Partisipasi: Ketika informasi anggaran tersedia secara terbuka, masyarakat akan lebih mudah memahami dan mengawasi penggunaan anggaran, sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi.
- Partisipasi Meningkatkan Transparansi: Partisipasi masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk menjadi lebih transparan dalam pengelolaan anggaran.

Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengkaji hubungan antara transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menunjukkan

adanya hubungan positif antara kedua variabel. Namun, hasil penelitian juga dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda-beda di setiap negara.

Temuan Umum Penelitian Terdahulu:

- Transparansi anggaran yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi.
- Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah.
- Hambatan utama partisipasi masyarakat adalah kurangnya informasi, kurangnya kapasitas, dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat merupakan dua konsep yang saling terkait dan saling memperkuat. Transparansi yang tinggi akan mendorong partisipasi masyarakat, sementara partisipasi masyarakat yang aktif akan mendorong pemerintah untuk menjadi lebih transparan. Untuk membangun pemerintahan yang baik dan demokratis, penting untuk terus meningkatkan transparansi anggaran dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat, seperti peran media, pengaruh budaya, dan dampak teknologi informasi. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada evaluasi efektivitas berbagai mekanisme partisipasi masyarakat dan pengembangan indikator yang lebih komprehensif untuk mengukur tingkat transparansi dan partisipasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran data secara objektif dan analisis statistik yang dapat mengidentifikasi pola serta hubungan antarvariabel. (Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, 2022)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung praktik transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan di Kota Tanjungpinang. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana informasi anggaran tersedia dan bagaimana masyarakat mengakses serta memanfaatkan informasi tersebut dalam pengawasan.

Wawancara digunakan untuk menggali pandangan mendalam dari berbagai pihak terkait, seperti pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang persepsi mereka terhadap transparansi anggaran dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen resmi, seperti laporan keuangan daerah, dokumen perencanaan anggaran, dan laporan audit independen.

Dokumen-dokumen ini memberikan data sekunder yang relevan untuk melengkapi temuan dari observasi dan wawancara.

Kombinasi teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana tingkat transparansi anggaran di kota Tanjung Pinang?

Tingkat transparansi anggaran di Kota Tanjungpinang menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Transparansi ini mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan laporan keuangan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Tanjungpinang telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi anggaran melalui penerapan sistem digital dan keterbukaan informasi publik.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan akses terhadap dokumen anggaran daerah melalui situs resmi pemerintah kota. Informasi ini mencakup perencanaan anggaran, realisasi belanja, dan laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana publik. Selain itu, program seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan juga menjadi platform bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan anggaran.

Dinas terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), secara rutin mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit, baik melalui situs resmi maupun forum diskusi dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan pemerintah untuk menyampaikan informasi keuangan secara transparan dan dapat diakses oleh publik (POM, 2024).

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan transparansi anggaran yang ideal di Tanjungpinang. Beberapa laporan menunjukkan bahwa meskipun informasi anggaran tersedia, tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat dan kurangnya sosialisasi terkait penggunaan platform digital untuk mengakses informasi tersebut.

Selain itu, laporan independen yang menilai secara objektif tingkat transparansi anggaran di Tanjungpinang masih terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi yang lebih menyeluruh untuk memastikan bahwa informasi anggaran yang tersedia tidak hanya terbuka, tetapi juga dapat diakses dengan mudah dan dipahami oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, meskipun Kota Tanjungpinang telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan transparansi anggaran, tantangan dalam hal partisipasi masyarakat dan literasi informasi masih perlu diatasi. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga independen, sangat diperlukan untuk

mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat transparansi anggaran dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan?

Transparansi dan partisipasi memiliki hubungan yang erat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai pengelolaan keuangan negara. Ketika pemerintah bersikap transparan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami bagaimana anggaran direncanakan, dialokasikan, dan digunakan, sehingga memotivasi mereka untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan. Misalnya, penerapan sistem e-budgeting di beberapa daerah Indonesia telah menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus partisipasi mereka dalam mengawasi program pembangunan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara simultan memengaruhi pengelolaan keuangan desa, di mana keterbukaan informasi anggaran mendorong masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan desa. Dengan demikian, transparansi bukan hanya sekadar kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi prasyarat penting untuk membangun partisipasi masyarakat yang kuat dalam pengawasan keuangan negara (Lambajang et al., 2018).

Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat transparansi anggaran dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara. Transparansi anggaran yang tinggi menciptakan keterbukaan informasi mengenai penggunaan dan alokasi dana publik, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk memahami proses pengelolaan keuangan negara. Ketika masyarakat diberikan akses terhadap informasi anggaran yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami, hal ini meningkatkan rasa percaya dan kepedulian terhadap pengelolaan keuangan publik.

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung lebih aktif terlibat dalam pengawasan, baik melalui mekanisme formal seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun mekanisme informal seperti pengawasan melalui media sosial atau laporan ke lembaga pengawas. Sebaliknya, kurangnya transparansi anggaran seringkali memunculkan ketidakpercayaan dan sikap apatis dari masyarakat, yang menghambat partisipasi mereka dalam pengawasan. Penelitian dan kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat transparansi anggaran yang lebih tinggi biasanya memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam mengawasi pengelolaan anggaran publik, menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan efisien (Yanti et al., 2023).

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara?

a. Faktor Pendukung

1) Harapan dan Keinginan dari Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara didorong oleh harapan dan keinginan mereka untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Masyarakat yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap pengelolaan keuangan negara yang jujur dan efisien cenderung lebih aktif terlibat dalam pengawasan. Harapan ini sering kali muncul dari kebutuhan akan pemerataan pembangunan, peningkatan layanan publik, dan penghapusan korupsi.

2) Kesadaran Diri Masyarakat

Kesadaran individu akan pentingnya peran mereka dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara menjadi faktor pendukung utama. Ketika masyarakat memahami bahwa mereka memiliki hak dan tanggung jawab untuk memantau penggunaan anggaran publik, mereka lebih terdorong untuk berpartisipasi secara aktif. Edukasi yang konsisten dari pemerintah atau lembaga terkait dapat membantu meningkatkan kesadaran ini.

3) Dukungan Pemerintah

Dukungan dari pemerintah, baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas, memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah yang membuka akses informasi anggaran secara transparan, menyediakan platform pengawasan, serta menciptakan forum komunikasi antara masyarakat dan lembaga pemerintah akan memperkuat keterlibatan masyarakat. Contoh dukungan ini adalah implementasi sistem e-budgeting, musyawarah publik, atau penyelenggaraan program edukasi terkait pengawasan keuangan negara (Yuniza & Malau, 2025).

b. Faktor Penghambat

1) Pekerjaan atau Kondisi Ekonomi

Faktor pekerjaan dan kondisi ekonomi sering menjadi hambatan bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara. Masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan atau yang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari cenderung memiliki waktu dan energi yang terbatas untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan. Selain itu, bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil, prioritas utama mereka sering kali berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan keterlibatan dalam isu-isu publik seperti pengelolaan keuangan negara (Abdillah, 2021).

2) Tingkat Pendidikan yang Rendah

Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi hambatan signifikan dalam partisipasi masyarakat. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah sering kali kesulitan memahami konsep-konsep dasar keuangan negara, laporan anggaran, atau proses pengelolaan dana publik. Akibatnya, mereka cenderung merasa tidak

percaya diri untuk ikut serta dalam pengawasan atau bahkan tidak menyadari pentingnya peran mereka dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Rendahnya literasi ini juga mengakibatkan kurangnya kesadaran kritis terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi anggaran yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi anggaran, namun masih terdapat tantangan terkait pemahaman dan pemanfaatan informasi anggaran oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat didorong melalui peningkatan literasi keuangan, pemberdayaan melalui pendidikan, dan penyediaan platform yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Faktor pendukung seperti harapan dan keinginan masyarakat, kesadaran diri, serta dukungan pemerintah sangat berpengaruh terhadap partisipasi, sementara hambatan utama datang dari faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan edukatif serta dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga independen.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah Kota Tanjungpinang terus meningkatkan upaya transparansi anggaran dengan memperluas akses informasi kepada masyarakat, terutama melalui platform digital yang mudah diakses. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program edukasi dan pelatihan agar mereka dapat lebih memahami informasi anggaran dan terlibat aktif dalam pengawasan. Pemerintah juga diharapkan untuk memperhatikan hambatan sosial ekonomi, seperti pekerjaan dan pendidikan, dengan menciptakan ruang-ruang partisipatif yang fleksibel dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. I. P. (2021). Peran Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa (Studi di Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan). *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(2), 67–74.
- Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Hikmah, L. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. *Doctoral Dissertation, IAIN Jember*. <http://digilib.iain-jember.ac.id/940/1/SKRIPSI.pdf>
- Lambajang, A. A., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2018). Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 9(1), 104–117. <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.19630>

- POM, B. (2024). Laporan Keuangan Audit 2023 Loka POM di Tanjung Pinang. *Laporan*, 7(2).
- Werimon, S. (2013). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Anggota DPRD Kota di Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Wijanarko, K. B. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SUKOHARJO II KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU. *Skripsi*, VIII(I), 1–19.
- Yanti, E. R., Wiralestari, & Tiswiyanti, W. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(01), 53–64. doi: <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1543>
- Yuniza, M., & Malau, H. (2025). *Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selatan*. 06(01), 1–12.